PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 053 TAHUN 2017

TENTANG

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
b. bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak, perlu diatur dalam suatu pedoman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2540/SK/R/UI/2016 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia 2016-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Kantor Arsip UI adalah Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi yang memiliki wewenang penyelenggaraan Arsip Perguruan Tinggi sebagaimana amanat Undang-Undang yang berlaku tentang Kearsipan.
5. Klasifikasi Akses Arsip adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.
6. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah pengkategorian/penggolongan arsip pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan.
7. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
8. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
9. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
10. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip.
11. Tingkat klasifikasi keamanan arsip adalah pengelompokkan arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalamnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak.
12. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

13. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

Pasal 2

Ruang lingkup Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Universitas Indonesia meliputi:

a. klasifikasi kemanan arsip terdiri atas:
   1. biasa/umum/terbuka;
   2. terbatas;
   3. rahasia; dan
   4. sangat rahasia.
b. pengamanan fisik dan informasi arsip terdiri atas:
   1. pengamanan ruang simpan arsip;
   2. penentuan pengelola arsip; dan
   3. daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
c. tabel klasifikasi keamanan dan pengamanan akses arsip di lingkungan Universitas Indonesia;
d. klasifikasi akses terdiri atas:
   1. pengguna internal; dan
   2. pengguna eksternal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas, otentisitas dan reliabilitas arsip tetap dapat terpenuhi.

Pasal 4

Mengatur akses arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

BAB III
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP

Pasal 5

Klasifikasi keamanan dan akses arsip di lingkungan Universitas Indonesia dilaksanakan dengan menerapkan azas gabungan yaitu sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.

Pasal 6

Arsip yang tercipta di Universitas Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia.

Bagian Kesatu
Klasifikasi Keamanan Arsip Biasa

Pasal 7

Arsip Universitas Indonesia yang termasuk ke dalam kategori arsip umum merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Universitas Indonesia antara lain:

a. publikasi universitas;
b. keputusan dan peraturan universitas yang bersifat umum; dan
c. pidato guru besar.

Bagian Kedua

Klasifikasi Keamanan Arsip Terbatas

Pasal 8

Arsip Universitas Indonesia yang termasuk ke dalam kategori arsip terbatas merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit kerja di lingkungan Universitas Indonesia, antara lain:

a. notulen rapat;
b. gambar teknik/*blue print*;
c. laporan hasil audit internal dan eksternal; dan/atau
d. daftar arsip vital.

Bagian Ketiga

Klasifikasi Keamanan Arsip Rahasia

Pasal 9

Arsip yang tergolong ke dalam kategori rahasia mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Universitas Indonesia antara lain:

a. kasus hukum sengketa;
b. hak kekayaan intelektual; dan/atau
c. bukti kepemilikan asset.

Bagian Keempat

Klasifikasi Keamanan Arsip Sangat Rahasia

Pasal 10

Arsip yang tergolong ke dalam kategori sangat rahasia mengandung dampak yang luas hingga mengganggu stabilitas kenegaraan antara lain:

a. penelitian tentang kekuatan kemaritiman negara; dan/atau
b. penelitian yang menguak kekayaan negara.

BAB IV
PENGAMANAN FISIK DAN INFORMASI ARSIP

Bagian Kesatu
Pengamanan Ruang Simpan Arsip

Pasal 11

Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan antara lain pemasangan kamera pengawas *Closed Circuit Televition / CCTV*, kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip.

Pasal 12

Pengamanan terhadap arsip disesuaikan dengan tingkat klasifikasi arsip.

Bagian Kedua
Penentuan Pengelola Arsip

Pasal 13

Arsiparis pengelola arsip statis berperan dalam pengamanan arsip statis di Pusat Arsip Kantor Arsip UI.

Pasal 14

Arsiparis pengelola arsip inaktif berperan dalam pengamanan arsip di *records centre.*

Pasal 15

Arsiparis sebagai pengelola arsip aktif berperan dalam pengamanan arsip di *central file* unit terkait.

Bagian Ketiga

Daftar Arsip Terbatas dan Daftar Informasi Publik Dikecualikan

Pasal 16

Penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar informasi publik dikecualikan termasuk ke dalam pengamanan informasi arsip.

Pasal 17

Daftar arsip terbatas dan daftar arsip informasi dikecualikan digunakan sebagai acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *records centre* maupun *central file.*

BAB V

KLASIFIKASI AKSES

Pasal 18

Pengguna arsip yang diberikan hak akses, terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu:

a. pengguna yang ada di lingkungan internal; dan
b. eksternal Universitas Indonesia.

Pasal 19

Pengguna internal dan eksternal dapat mengakses informasi Universitas Indonesia yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 20

Klasifikasi akses ditentukan setelah dibuatnya skema Keamanan Arsip.

Bagian Kesatu
Akses Internal

Pasal 21

Setiap pegawai Universitas Indonesia hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

Sebagai pimpinan tinggi, Rektor Universitas Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya.

Pasal 23

Pimpinan tingkat tinggi di bawah pimpinan level tertinggi mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya.

Pasal 24

Pimpinan tingkat tinggi di bawah pimpinan level tertinggi tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin.

Pasal 25

Pimpinan tingkat menengah (satu tingkat di bawah pimpinan level tinggi) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya.

Pasal 26

Pimpinan tingkat menengah (satu tingkat di bawah pimpinan level tinggi) tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.

Pasal 27

Pelaksana Kebijakan, yaitu arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa.

Pasal 28

Pelaksana kebijakan tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas dan rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.

Bagian Kedua
Akses Eksternal

Pasal 29

Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/umum/terbuka.

Pasal 30

Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2017
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met
NIP 195706261985031002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
1	PDP	PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN															
		00	KEMAHASISWAAN														
			00	PERENCANAAN PENERIMAAN MAHASIWA		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Perencanaan Penerimaan Mahasiswa Baru, seperti pembentukan panitia/ tim, tugas dan fungsi, notulensi rapat, daya tampung mahasiswa, hingga laporan rencana penerimaan mahasiswa baru. Indeks "PDP.00.00 - Kepanitiaan" terkait 'penerimaan mahasiswa' diganti menjadi PDP.00.00 – Perencanaan Penerimaan Mahasiswa	1	Usulan Penerimaan Mahasiswa Baru	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	POB-PMB-004-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Notulen rapat perencanaan penerimaan mahasiswa		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							3	Data daya tampung program studi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							4	Pengumuman informasi pendaftaran penerimaan mahasiswa	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							5	SK Kepanitiaan/ Tim		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							6	SK Penetapan Biaya Pendaftaran	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							7	SK Penetapan Biaya Pendidikan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							8	Laporan rencana penerimaan mahasiswa baru		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
			01	SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA		Indeks “Seleksi Mahasiswa” berganti menjadi “Seleksi Penerimaan Mahasiswa”											
				00	PELAKSANAAN PENERIMAAN MAHASISWA	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa melalui jalur SIMAK, Undangan, Olimpiade Sains, dan Mahasiswa Asing		**Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SIMAK**								Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	POB-PMB-001-UN2.R-OTL.03.00-2015
							1	Formulir Pendaftaran (data calon mahasiswa)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	POB-PMB-002-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Daftar Hadir peserta dan petugas		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
							3	Kartu Peserta Ujian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
							4	Surat permintaan petugas ujian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
							5	Daftar petugas ujian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
							6	Berita Acara Ujian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
							7	Lembar jawaban (LJU) & soal peserta		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
							8	Surat permohonan pengamanan seleksi penerimaan mahasiswa baru	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
							9	Evaluasi pelaksanaan ujian	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
								Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Undangan, Olimpiade Sains, dan Mahasiswa Asing								Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	POB-PMB-003-UN2.R-OTL.03.00-2015
							1	Surat undangan sekolah	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	POB-PMB-005-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Dokumen kriteria seleksi		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	POB-PMB-006-UN2.R-OTL.03.00-2015
							3	Dokumen usulan bobot mata pelajaran		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
							4	Validasi dan penilaian kelulusan calon mahasiswa		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
							5	Surat rekomendasi pendaftar/ calon mahasiswa asing		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
							6	Surat rekomendasi pendaftar jalur olimpiade sains		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
							7	Surat penawaran kepada pendaftar jalur olimpiade sains		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
							8	Evaluasi seleksi undangan, olimpiade sains, dan mahasiswa asing		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
							9	Juklak dan Juknis Penerimaan Mahasiswa Baru	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP			Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
										B	T	R	SR					
	1	2	3	4														
				02	HASIL SELEKSI	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa	1	Notula rapat Penetapan Mahasiswa yang diterima			√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
							2	SK Penetapan Calon Mahasiswa Lulus (Jalur SIMAK, Undangan, Mahasiswa Asing, Olimpiade Sains)			√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
							3	Pengumuman Calon Mahasiswa Lulus	√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
							4	Berkas calon mahasiswa diterima			√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
							5	Berkas calon mahasiswa tidak diterima			√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
				03	NASKAH SOAL UJIAN	Naskah-naskah yang berkaitan tentang proses penyusunan naskah soal ujian penerimaan mahasiswa baru	1	Naskah soal TPA SIMAK UI				√		Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
							2	Naskah soal Bahasa Inggris SIMAK UI				√		Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
							3	SK Penetapan pembuat soal ujian			√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
							4	Notulen rapat penyusunan soal ujian			√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	
			02	REGISTRASI MAHASISWA			1	Jadwal Registrasi Mahasiswa	√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Direktorat Pendidikan	POB-DITPEND-002-UN2.R-OTL.03.00-2015

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
						Naskah-naskah yang berkaitan tentang Registrasi Mahasiswa Baru dan/ atau registrasi ulang mahasiswa setiap semester. Registrasi akademik (melalui SIAK-NG setelah tahun 2004). Registrasi akademik (Formulir Rencana Studi sebelum tahun 2004)	2	Jadwal pembayaran biaya pendidikan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Direktorat Keuangan	
							3	Dokumen keringanan biaya operasional pendidikan berkeadilan (BOP B dan BOP P)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Direktorat Kemahasiswaan	
							4	Surat permintaan konfirmasi kesiapan registrasi mahasiswa baru		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Direktorat Pendidikan	
							5	Notifikasi kesiapan pembagian jaket kuning mahasiswa baru, input sidik jari, pemeriksanaan kesehatan, fasilitas registrasi		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Direktorat Kemahasiswaan DSTI Klinik Satelit DPPF	
							6	Dokumen verifikasi data registrasi mahasiswa baru		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Direktorat Pendidikan	
							7	Data ukuran jaket mahasiswa dan sidik jari mahasiswa		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Direktorat Kemahasiswaan DSTI	
							8	Import data mahasiswa ke SIAK-NG		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Direktorat Pendidikan	
							9	Dokumen penyerahan Kartu Identitas Mahasiswa (KIM)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	DSTI	
							10	Dokumen wawancara peserta Bidik Misi		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Direktorat Kemahasiswaan	
							11	Data hasil pemeriksanaan kesehatan mahasiswa S1 dan Vokasi		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Klinik Satelit	

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
			03	TRANSFER/ALIH KREDIT		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Transfer atau Alih Kredit	1	Surat permohonan alih kredit		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Fakultas	POB-KUI-006-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Surat persetujuan/penolakan alih kredit		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Fakultas	POB-KUI-011-UN2.R-OTL.03.00-2015
			04	EKSTRAKULIKULER MAHASISWA													
				00	ORGANISASI KEMAHASISWAAN	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	1	Surat keputusan pendirian keorganisasian	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Direktorat Kemahasiswaan BLLH UKM	
							2	AD/ ART	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	UKM	
							3	Program kerja tahunan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	UKM	
							4	Laporan kegiatan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Direktorat Kemahasiswaan UKM	
							5	Proposal Bantuan dana kegiatan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Direktorat Kemahasiswaan UKM	POB-DITMAWA-016-UN2.R-OTL.03.00-2015
							6	Surat permohonan izin kegiatan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Direktorat Kemahasiswaan UKM	POB-DITMAWA-018-UN2.R-OTL.03.00-2015
				01	MAHASISWA BERPRESTASI	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Mahasiswa Berprestasi	1	Jadwal Seleksi Mahasiswa Berprestasi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							2	Notulen Rapat persiapan seleksi mahasiswa berprestasi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							3	Surat permintaan calon mahasiswa berprestasi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							4	Dokumen kriteria seleksi mahasiswa berprestasi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							5	Berkas calon mahasiswa berprestasi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							6	Borang kelengkapan berkas mahasiswa berprestasi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							7	Dokumen penetapan juri seleksi mahasiswa berprestasi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							8	Hasil penilaian seleksi mahasiswa berprestasi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							9	SK Penetapan pemenang seleksi mahasiswa berprestasi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
				02	KARYA TULIS ILMIAH	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa	1	Pengumuman seleksi karya ilmiah mahasiswa	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							2	Persyaratan seleksi karya ilmiah mahasiswa	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							3	Laporan kegiatan seleksi karya ilmiah mahasiswa	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
				03	PELATIHAN/ SEMINAR/ WORKSHOP	Naskah-naskah yang berkaitan tentang kegiatan Pelatihan/ Seminar/ Workshop yang diselenggarakan oleh Organisasi Mahasiswa	1	Notulen rapat persiapan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	DRPM DIIB Direktorat Kemahasiswaan	POB-DIIB-004-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Pengumuman kegiatan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	DRPM DIIB Direktorat Kemahasiswaan	
							3	Surat undangan narasumber	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	DRPM DIIB Direktorat Kemahasiswaan	
							4	Berkas pendaftaran	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	DRPM DIIB Direktorat Kemahasiswaan	
							5	Materi pelatihan/ seminar/ workshop	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	DRPM DIIB Direktorat Kemahasiswaan	
							6	Laporan dan evaluasi Pelatihan/ Seminar/ Workshop	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	DRPM DIIB Direktorat Kemahasiswaan	
				04	PERTUKARAN MAHASISWA	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Pertukaran Mahasiswa Indeks "PDP.00.04.04 – Studi Banding/ Pertukaran Mahasiswa" tidak digunakan, Diganti menjadi "PDP.00.04.04 – PERTUKARAN MAHASISWA"		**Pertukaran Mahasiswa UI ke Universitas mitra UI**									POB-KUI-006-UN2.R-OTL.03.00-2015
							1	Penawaran pertukaran dari Universitas mitra UI		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							2	Berkas calon pertukaran mahasiswa		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							3	Hasil seleksi calon pertukaran mahasiswa		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							4	Berkas wawancara seleksi calon pertukaran mahasiswa		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							5	Dokumen penetapan hasil seleksi calon pertukaran mahasiswa		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							6	Notifikasi calon pertukaran mahasiswa (diterima / ditolak)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							7	Letter of Acceptance (LoA) dari Universitas mitra UI		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
						Naskah-naskah yang berkaitan tentang Pertukaran Mahasiswa Asing ke UI (Student Exchange, Study Abroad Program, Darmasiswa, BIPA Exchange)		**Pertukaran Mahasiswa Asing ke UI**									POB-KUI-011-UN2.R-OTL.03.00-2015
							1	Daftar kuliah (*course)* dari Direktorat Pendidikan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							2	Informasi Exchange Program	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							3	List of courses	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							4	Leaflet & guidelines	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							5	Application form		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
				~~05~~	~~BAKAT/MINAT MAHASISWA~~	Indeks "PDP.00.04.05 – Bakat/ Minat Mahasiswa" tidak digunakan, Lihat "PDP.00.04.00 – ORGANISASI KEMAHASISWAAN" untuk kegiatan peminatan mahasiswa											
			05	KESEJAHTERAAN DAN FASILITAS													
				00	BEASISWA	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Beasiswa untuk Mahasiswa, seperti Beasiswa Bidik Misi, Beasiswa Afirmasi, Beasiswa non Bidik Misi non Afirmasi	1	Surat penawaran dari pendonor		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-DITMAWA-006-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Persyaratan beasiswa	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DITMAWA-007-UN2.R-OTL.03.00-2015
							3	Surat permohonan usulan beasiswa		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-DITMAWA-008-UN2.R-OTL.03.00-2015
							4	Dokumen pengajuan beasiswa		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-DITMAWA-009-UN2.R-OTL.03.00-2015
							5	Dokumen/Borang seleksi beasiswa		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-DITMAWA-010-UN2.R-OTL.03.00-2015
							6	Dokumen hasil keputusan beasiswa		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-KUI-002-UN2.R-OTL.03.00-2015
							7	Dokumen pengumuman beasiswa		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							8	Surat pencairan dana		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							9	Dokumen pencairan dana		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							10	Rekapitulasi laporan beasiswa		√			Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							11	Laporan akademik penerima beasiswa (transkrip akademik per semester)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
				01	UANG KULIAH TUNGGAL	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pengajuan keringanan biaya kuliah Indeks "PDP.00.05.01 - Keringanan Biaya Kuliah" tidak digunakan, diganti menjadi "PDP.00.05.01 - UANG KULIAH TUNGGAL"	1	Informasi pengumuman/penjelasan UKT	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DITMAWA-003-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Surat Keputasan biaya pendidikan UKT		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-DITMAWA-004-UN2.R-OTL.03.00-2015
							3	Borang/ Form isian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							4	Dokumen permohonan Keringanan (keringanan, cicilan, pembebasan spp)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							5	Dokumen hasil review dan survey		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							6	Rumus matriks penetapan UKT		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							7	Data Entri		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							8	Dokumen Penetapan UKT (SK Rektor)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							9	Rekapitulasi pengajuan dan penerima UKT		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							10	Surat Keputusan penerima UKT		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
				02	BIMBINGAN DAN KONSELING	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Bimbingan dan Konseling Mahasiswa	1	Informasi layanan pendampingan Mahasiswa Baru		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-DITMAWA-012-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Data identifikasi penerima beasiswa bermasalah		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-DITMAWA-013-UN2.R-OTL.03.00-2015
							3	Jadwal pertemuan dengan konselor		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-DITMAWA-014-UN2.R-OTL.03.00-2015
							4	Rekomendasi hasil konseling		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
				~~03~~	~~BURSA KERJA~~	Indeks "PDP.00.05.03 – Bursa Kerja" tidak digunakan, lihat "PDP.00.06.03 – CAREER DEVELOPMENT CENTER"												
				04	ASRAMA & FASILITAS MAHASISWA	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Asrama dan Fasilitas Mahasiswa. Indeks "PDP.00.05.04 - Fasilitas" tidak digunakan, diganti menjadi "PDP.00.05.04 – ASRAMA & FASILITAS MAHASISWA"		**Asrama Mahasiswa**										
							1	Peraturan Asrama Mahasiswa	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							2	Seleksi dan Penetapan penghuni		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							3	Berkas penghuni asrama		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							4	Izin/ kegiatan penghuni asrama		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							5	Berkas sewa kamar bagi tamu		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
								Kecelakaan Mahasiswa									POB-DITMAWA-002-UN2.R-OTL.03.00-2015
							1	Berkas Klaim									
								Fasilitas Kesehatan (Klinik Satelit)									POB-KLINIK-001-UN2.R-OTL.03.00-2015
							1	Berkas Pendaftaran									
			06	DATA DAN ALUMNI													
				00	DATA ALUMNI	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Data Alumni, Tracer Study. Data tracer study lihat "HMI.04.00 - DATA/ STATISTIK AKADEMIK UNIVERSITAS"	1	Buku Alumni/ Daftar Wisudawan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							2	Borang tracer study		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-DPKHA-006-UN2.R-OTL.03.00-2015
				01	PERSATUAN ORANG TUA MAHASISWA (POM)	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Persatuan Orang Tua Mahasiswa (POM)	1	Susunan pengurus Persatuan orang tua mahasiswa (POM)	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							2	Laporan kegiatan persatuan orang tua mahasiswa	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							3	Berkas bantuan/ sumbangann persatuan orang tua mahasiswa		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
				02	IKATAN ALUMNI (ILUNI)	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Ikatan Alumni (ILUNI). Data alumni lihat "HMI.04.00 - DATA/ STATISTIK AKADEMIK UNIVERSITAS"			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DPKHA-004-UN2.R-OTL.03.00-2015

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
				03	BURSA KERJA (CDC - CAREER DEVELOPMENT CENTER)	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Bursa Kerja, CDC, Career & Scholarship Expo.			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DPKHA-001-UN2.R-OTL.03.00-2015
			07	KELULUSAN		Indeks "PDP.00.07 – Penyerahan Ijazah/ Transkrip" tidak digunakan, diganti menjadi "PDP.00.07 – KELULUSAN"											
				00	WISUDA	Naskah-naskah yang berkaitan tentang kegiatan wisuda mahasiswa. Indeks "PDP.00.07.00 – Upacara Wisuda" tidak digunakan, diganti menjadi "PDP.00.07.00 – WISUDA" Data Lulusan dan Mahasiswa Berprestasi masuk "HMI.04.00 - DATA/ STATISTIK AKADEMIK UNIVERSITAS" Buku Induk dan Nomor Registrasi Kelulusan masuk "PDP.00.06.00 – DATA ALUMNI"	1	Administrasi Kelulusan mahasiswa								POB-DPKHA-003-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Protokoler Wisuda	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
				01	IJAZAH DAN TRANSKRIP	Naskah-naskah yang berkaitan tentang berkas ijazah dan transkrip mahasiswa Indeks "PDP.00.07.01 – Ijazah/ Sertifikat" tidak digunakan, diganti menjadi "PDP.00.07.00 – IJAZAH DAN TRANSKRIP"	1	Salinan Ijazah (tercetak)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-DITPEND-020-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Salinan Transkrip (tercetak)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							3	Penetapan kelulusan (Yudisium)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
		01	PERKULIAHAN			Indeks "PDP.01 – Kegiatan Perkuliahan" tidak digunakan, diganti menjadi "PDP.01 – PERKULIAHAN"											

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
			00	DAFTAR HADIR PERKULIAHAN		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Daftar hadir perkuliahan Indeks "PDP.01.00 – Daftar Hadir/ Absensi" tidak digunakan, diganti menjadi "PDP.01 – DAFTAR HADIR PERKULIAHAN"	1	*Daftar hadir mahasiswa dan/atau dosen*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							2	*Surat ijin tidak mengikuti perkuliahan*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							3	*Surat keterangan sakit*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			01	KALENDER/JADWAL AKADEMIK		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Kalender/ Jadwal Akademik Indeks "PDP.01.01 – Kalender Akademik/ Jadwal" tidak digunakan, diganti menjadi "PDP.01.01 – KALENDER/ JADWAL AKADEMIK"			√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DITPEND-006-UN2.R-OTL.03.00-2015
			02	UJIAN		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Ujian Mahasiswa Indeks "PDP.01.02 – Daftar Nilai Ujian" tidak digunakan, diganti menjadi "PDP.01.02 – UJIAN"	1	Jadwal ujian (ruangan, waktu, pengawas)	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							2	Soal-soal ujian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							3	Daftar peserta ujian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							4	Berita acara		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							5	Tata tertib ujian	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							6	Dispensasi ujian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							7	Nilai hasil ujian (termasuk DNU dan DNS)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			03	DATA NILAI AKADEMIK		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Daftar nilai akademik Indeks "PDP.01.03 – Daftar Nilai Semester" tidak digunakan, diganti menjadi "PDP.01.03 – DAFTAR NILAI AKADEMIK"				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			~~04~~	~~TRANSKRIP~~		"PDP.01.04 – Transkrip" tidak digunakan Lihat "PDP.00.07.01 – Ijazah dan Transkrip"											
			05	STATUS MAHASISWA		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Status Mahasiswa seperti Cuti Akademik, Berhenti Kuliah, Pernyataan Kuliah, Surat Ijin bagi Mahasiswa Asing											
				00	CUTI KULIAH	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Cuti Kuliah Mahasiswa	1	Surat permohonan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-DITPEND-013-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Surat persetujuan/penolakan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							3	Surat keputusan Pimpinan Fakultas/Universitas		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
				01	BERHENTI KULIAH	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Berhenti Kuliah Mahasiswa	1	Berkas Drop out (DO)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Direktorat Pendidikan	POB-DITPEND-015-UN2.R-OTL.03.00-2015

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							2	Berkas Meninggal dunia		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-DITPEND-016-UN2.R-OTL.03.00-2015
							3	Berkas Mengundurkan diri		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
				02	PERNYATAAN KULIAH	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Pernyataan Kuliah Mahasiswa. Indeks "PDP.01.05.02 – Pernyataan Masih Kuliah" tidak digunakan, diganti menjadi "PDP.01.05.02 – PERNYATAAN KULIAH"	1	Keterangan status mahasiswa		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Direktorat Pendidikan	POB-DITPEND-014-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Keterangan lintas fakultas		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							3	Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							4	Surat Keterangan Lapor (SKLD)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							5	Surat Tanda Melapor (STM)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							6	Surat izin menetap		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							7	Re-entry Exit Permit		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
		02	SARANA PERKULIAHAN														

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
			00	LABORATORIUM		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Manajemen Laboratorium dan Workshop	1	Layanan penggunaan laboratorium	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Laboratorium	POB-K3L-008-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Perencanaan pengembangan Lab	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Laboratorium	POB-DRPM-009-UN2.R-OTL.03.00-2015
							3	Penggunaan peralatan laboratorium	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							4	Jadwal penggunaan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							5	Laporan kegiatan laboratorium	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			01	PERPUSTAKAAN		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Manajemen Perpustakaan, seperti pengembangan koleksi, pengolahan bahan pustaka, layanan pengguna, preservasi bahan pustaka, edukasi pemustaka, keanggotaan himpunan atau asosiasi.	1	Daftar pengembangan koleksi dari internal perguruan tinggi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	UPT Perpustakaan	POB-PERPUS-001-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Daftar buku terseleksi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	UPT Perpustakaan	POB-PERPUS-002-UN2.R-OTL.03.00-2015
							3	Daftar buku dalam pemesanan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							4	Daftar buku dalam permintaan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							5	Pembelian buku/jurnal/majalah oleh perpustakaan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							6	Program tukar menukar buku berkaitan dengan pengembangan bahan pustaka	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							7	Hibah/ hadiah/ sumbangan buku untuk perpustakaan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							8	Penyiangan bahan perpustakaan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							9	Kebijakan Layanan Perpustakaan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							10	layanan perpustakaan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							11	Layanan dengan fasilitas komputerisasi (layanan elektronik)	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							12	Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							13	Administrasi pengolahan deposit bahan pustaka	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							14	Kartu Anggota		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							15	Daftar Anggota		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
				~~00~~	~~PENGEMBANGAN KOLEKSI~~												
				~~01~~	~~PENGOLAHAN~~	"PDP.02.01.00 – Pengembangan Koleksi; PDP.02.01.01 – Pengolahan;												

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
				~~02~~	~~PELAYANAN~~	PDP.02.01.02 – Pelayanan; PDP.02.01.03 – Kerjasama" tidak digunakan											
				~~03~~	~~KERJASAMA~~												
			02	RUMAH SAKIT PENDIDIKAN		Indeks "PDP.02.02 – RUMAH SAKIT PENDIDIKAN" adalah indeks yang digunakan untuk pengelolaan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia.											
				01	MEDIK DAN KEPERAWATAN	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Medik dan Keperawatan				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Rumah Sakit Pendidikan Klinik Satelit	
				02	NON MEDIK	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Non Medik				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Rumah Sakit Pendidikan Klinik Satelit	
				03	DOKTER TAMU	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Dokter Tamu				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Rumah Sakit Pendidikan Klinik Satelit	
				04	PENUNJANG MEDIK	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Penunjang medik				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Rumah Sakit Pendidikan Klinik Satelit	
				05	REKAM MEDIK	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Rekam Medik				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Rumah Sakit Pendidikan Klinik Satelit	
				06	FARMASI	Naskah-naskah yang berkaitan tentang farmasi				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Rumah Sakit Pendidikan Klinik Satelit	
				08	RENCANA AKADEMIK DAN RISET	Naskah-naskah yang berkaitan tentang rencana akademik dan riset				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Rumah Sakit Pendidikan Klinik Satelit	
				09	PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN RISET	Naskah-naskah yang berkaitan tentang 'Pelaksanaan kegiatan akademik dan riset				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Rumah Sakit Pendidikan Klinik Satelit	
				10	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN RISET	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik dan riset				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Rumah Sakit Pendidikan Klinik Satelit	

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
				11	LAPORAN *COASS (CO ASSISTANT)*	Naskah-naskah yang berkaitan tentang 'Laporan coass (co assistant)				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Rumah Sakit Pendidikan Klinik Satelit	
				12	PUSKESMAS YANG MERUJUK	Naskah-naskah yang berkaitan tentang 'Puskesmas yang merujuk				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Rumah Sakit Pendidikan Klinik Satelit	
				13	ASURANSI	Naskah-naskah yang berkaitan tentang 'Asuransi				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Rumah Sakit Pendidikan Klinik Satelit	
				14	LAPORAN KELAHIRAN & KEMATIAN	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Laporan kelahiran Termasuk Pemulasaran Jenazah				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Rumah Sakit Pendidikan Klinik Satelit	
				15	KASUS KHUSUS	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Kasus khusus				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Rumah Sakit Pendidikan Klinik Satelit	
				16	IZIN PRAKTIK PROFESI KESEHATAN	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Izin Praktik Profesi Kesehatan				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang	Rumah Sakit Pendidikan Klinik Satelit	
		03	KURIKULUM			Indeks "PDP.03 – Pengembangan Kurikulum" tidak digunakan, diganti menjadi "PDP.03 – KURIKULUM"											POB-DPA-001-UN2.R-OTL.03.00-2015
			00	PELAKSANAAN KURIKULUM		Indeks "PDP.03.00 – Silabus" tidak digunakan, diganti menjadi "PDP.03 – PELAKSANAAN KURIKULUM"											
				00	SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Satuan Acara Perkuliahan (SAP)	1	Administrasi pelaksanaan kurikulum	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							2	Sajian pelaksanaan kurikulum	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							3	GBPP	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							4	Satuan acara pelajaran/silabus	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							5	Bahan ajar (Modul, Handout)	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							6	Buku Pedoman Akademik	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							7	Katalog Mata Ajar	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							8	Buku rancangan pembelajaran (BRP)	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							9	Surat keputusan kurikulum	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
				01	EVALUASI PELAKSANAAN KURIKULUM	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum. Indeks "PDP.03.00.01 – Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum" tidak digunakan, diganti menjadi "PDP.03.00.01 – EVALUASI PELAKSANAAN KURIKULUM"			√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			~~01~~	~~BUKU AJAR~~		"PDP.03.01 – Buku Ajar" tidak digunakan Lihat "PDP.03.00 – Pelaksanaan Kurikulum"											

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
			02	PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM		Indeks "PDP.03.02 – Pedoman Penyusunan Kurikulum" digunakan untuk naskah yang berkaitan dengan buku pedoman penyusunan kurikulum				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
			03	PENGEMBANGAN KURIKULUM		Indeks "PDP.03.03 – Pengembangan Kurikulum" digunakan untuk naskah yang berkaitan dengan buku pengembangan kurikulum	1	Usulan pengembangan mata kuliah (proposal)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		POB-DPA-009-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Persetujuan/ penolakan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							3	Lokakarya pengembangan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							4	Hasil pengembangan kurikulum		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
		04	TUGAS AKHIR														
			~~00~~	~~PRAKTIK KERJA LAPANGAN~~		"PDP.04.00 – Tugas Akhir" tidak digunakan Lihat "PDP.04.01 – Naskah Tugas Akhir"											
			01	NASKAH TUGAS AKHIR (TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS, DISERTASI)		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			~~02~~	~~TESIS/ DISERTASI~~		"PDP.04.02 – Tesis/ Disertasi" tidak digunakan Lihat "PDP.04.01 – Naskah Tugas Akhir"											
			03	PROGRAM KHUSUS		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Program Khusus				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			04	ADMINISTRASI TUGAS AKHIR		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Administrasi Tugas Akhir.	1	Penentuan dosen pembimbing/ Penguji/ Promotor		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							2	Proposal usulan penelitian tugas akhir		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							3	Surat ijin penelitian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							4	Keputusan presentasi/ sidang tugas akhir		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							5	Laporan tugas akhir		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							6	Promosi Doktor		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
		05	ADMINISTRASI PENDIDIK														
			00	PENGAJARAN		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Administrasi Pengajaran oleh Tenaga Pendidik	1	Daftar kehadiran pendidik		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							2	Surat pemberitahuan ketidakhadiran		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							3	Pembinaan ketidakhadiran		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							4	Laporan realisasi pengajaran		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							5	Ekivalensi wajib mengajar penuh (EWMP)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							6	Panduan pengisian EWMP		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							7	Administrasi EWMP		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							8	Daftar isian beban tugas pendidik		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							9	Pembagian offering		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							10	Laporan perhitungan EWMP		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							11	Laporan EWMP pendidik		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							12	Rekapitulasi daftar kehadiran tenaga pendidik Tenaga Pendidik Luar (Dosen Tamu)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			01	BIMBINGAN DAN KONSULTASI MAHASISWA		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Bimbingan dan Konsultasi Mahasiswa oleh Tenaga Pendidik				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
		06	EVALUASI AKADEMIK														
			00	EVALUASI INTERNAL		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Evaluasi Internal Akademik	1	Kriteria penilaian evaluasi (EDOM)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-BPMA-002/UN2.R/OTL.03.00/2015
							2	Evisem (Evaluasi Internal Semester)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		POB-BPMA-001/UN2.R/OTL.03.00/2015

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							3	EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		POB-BPMA-003/UN2.R/OTL.03.00/2015
							4	Evin (evaluasi internal)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		POB-BPMA-003/UN2.R/OTL.03.00/2015
							5	Evitah (evaluasi internal tahunan)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		POB-BPMA-005/UN2.R/OTL.03.00/2015
			01	EVALUASI EKSTERNAL / AKREDITASI		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Evaluasi Eksternal (Akreditrasi Program Studi)	6	Permohonan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-BPMA-006/UN2.R/OTL.03.00/2015
							7	Isian borang akreditasi		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		POB-BPMA-007/UN2.R/OTL.03.00/2015
							8	Sertifikat akreditasi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-BPMA-008/UN2.R/OTL.03.00/2015
							9	Surat keputusan BAN-PT	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-BPMA-009/UN2.R/OTL.03.00/2015
			02	SERTIFIKASI DOSEN/TENAGA PENDIDIK LUAR UI		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Sertifikasi Tenaga Pendidik/ Dosen				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		POB-SDM-012-UN2.R-OTL.03.00-2015
			03	EVALUASI DAN KAJIAN PENGEMBANGAN FAKULTAS, PROGRAM, PROGRAM STUDI		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Kajian pengembangan Fakultas/ Program Studi				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
2	**PPM**	**PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**															
		00	PENELITIAN														

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
			00	PROGRAM PENELITIAN		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Program Penelitian baik menggunakan dana pemerintah, perusahaan pendonor, hibah, dsb.	1	Panduan Hibah/penelitian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		POB-DRPM-001-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	POB/ SOP pengajuan penelitian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		POB-DRPM-002-UN2.R-OTL.03.00-2015
							3	Dokumen Form Penilaian Penelitian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
			~~01~~	~~SUMBER PENDANAAN~~		"PPM.00.01 – Sumber Pendanaan" tidak digunakan lihat "PPM.00.00 – Program Penelitian"											
			02	PELAKSANAAN PENELITIAN		Naskah-naskah yang berkaitan tentang proses pelaksanaan penelitian di lingkungan UI	1	Dokumen usulan/ review		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		POB-DRPM-005-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Dokumen kontrak/perjanjian pelaksanaan penelitian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							3	Surat Keputusan Penerima Hiba Penelitian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
			03	LAPORAN													
				00	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN	Naskah-naskah yang berkaitan tentang laporan pertanggungjawaban kegiatan penelitian UI		Laporan penelitian terkait penggunaan anggaran dana	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DRPM-006-UN2.R-OTL.03.00-2015
				01	LAPORAN HASIL PENELITIAN	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Laporan hasil penelitian UI		Laporan monev, kemajuan penelitian, hasil akhir penelitian sesuai subjek penelitian.	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			04	DISEMINASI/ PUBLIKASI PENELITIAN		Naskah-naskah yang berkaitan tentang diseminasi atau publikasi penelitian UI	1	Dokumen publikasi penelitian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							2	Naskah Full Paper yang belum dipublikasikan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							3	Naskah Penelitian yang masih dalam proses		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							4	Naskah Penelitian yang sudah diterbitkan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							5	Data Pusat Riset		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							6	Daftar Hasil Penelitian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							7	Daftar Jurnal terakreditasi		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							8	Daftar Publikasi		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							9	Dokumen Conference Penelitian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							10	Daftar Kepakaran		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							11	Daftar Laboratorium		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
			05	DATA STATISTIK PENELITIAN		Naskah-naskah yang berkaitan tentang data pelaksanaan penelitian				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
		01	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT														

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
			00	KELEMBAGAAN		Naskah-naskah yang berkaitan tentang pendirian lembaga kajian atau pusat studi.			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DRPM-003-UN2.R-OTL.03.00-2015
			01	PELATIHAN/ SEMINAR/ KULIAH UMUM		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Kegiatan Pelatihan/ Seminar/ Workshop yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia.	1	Dokumen penyelenggaraan (materi kegiatan)	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DRPM-008-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Penyebaran brosur pelatihan/ kursus	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DIIB-004-UN2.R-OTL.03.00-2015
							3	Pendaftaran peserta									
							4	Jadwal acara	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							5	Dokumen penentuan pembicara/ instruktur/narasumber									
							6	Kumpulan Makalah/proposal	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							7	Pelaksananan kursus	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							8	Evaluasi dan Laporan Kegiatan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
			02	KONSULTASI		Naskah-naskah yang berkaitan tentang kegiatan Konsultasi lembaga	1	Dokumen kegiatan operasional konsultan/ pengajar		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							2	Surat permohonan konsultasi		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
			03	PENYULUHAN		Naskah-naskah yang berkaitan tentang kegiatan penyuluhan											
			~~04~~	~~KERJASAMA~~		"PPM.01.04 – Kerjasama" tidak digunakan lihat penjelasan "PPM – Penelitian dan Pengabdian Masyarakat"											

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP			Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
										B	T	R	SR					
	1	2	3	4														
			05	BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT		Naskah-naskah yang berkaitan tentang kegiatan Bantuan Sosial UI kepada Masyarakat	1	Dokumen permohoan bantuan sosial		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							2	Laporan kegiatan bantuan sosial	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			06	INOVASI														
				00	HAK CIPTA	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Hak Cipta (Kekayaan Intelektual)	1	Dokumen HAKI	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DIIB-001-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Prosedur Pengajuan HAKI, Hak Cipta, Hak Dagang		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							3	Surat permohonan pengajuan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							4	Laporan hasil pengajuan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							5	POB/SOP pengajuan penelitian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							6	Panduan Hibah/penelitian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							7	Dokumen kontrak/perjanjian pelaksanaan penelitian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							8	Dokumen usulan/ review		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							9	Dokumen Form Penilaian Penelitian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							10	Laporan Hasil Monev		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							11	Laporan hasil penelitian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							12	Surat Keputusan Penerima Hiba Penelitian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							13	Hasil Paten Penelitian	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							14	Dokumen publikasi penelitian	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
				01	PATEN	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Kekayaan Intelektual yang berpotensi Paten	1	Dokumen HAKI	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DIIB-002-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Prosedur Pengajuan Paten		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		POB-DIIB-003-UN2.R-OTL.03.00-2015
							3	Surat permohonan pengajuan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							4	Laporan hasil pengejuan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
			07	GELAR KEHORMATAN		Naskah-naskah yang berkaitan tentang pemberian gelar kehormatan dari UI kepada Tokoh Nasional maupun Internasional, termasuk “adjunct professor”.	1	Seleksi pemberian gelar		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							2	Persetujuan/ penolakan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							3	Sertifikat/ Piagam Penghargaan Guru Besar/ Honoris Causa	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							4	Laporan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							5	Daftar nama penerima gelar kehormatan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			08	DATA STATISTIK PENGABDIAN		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Data Statistik kegiatan Pengabdian Masyarakat			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			09	LAPORAN DAN EVALUSI PENGABDIAN MASYARAKAT		Naskah-naskah yang berkaitan tentang laporan dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
3	SDM	SUMBER DAYA MANUSIA															
		00	PENGADAAN PEGAWAI														
			00	ANALISA/ PERENCANAAN FORMASI PEGAWAI		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Analisa/ Perencanaan Formasi Pegawai di lingkungann UI	1	Usulan formasi pegawai dari unit kerja		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							2	Daftar Formasi		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							3	Persetujuan oleh pimpinan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							4	Penetapan formasi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			01	PEREKRUTAN/ PENGADAAN PEGAWAI		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Pengadaan Pegawai			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-SDM-002-UN2.R-OTL.03.00-2015
			02	PENGANGKATAN PEGAWAI		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Pengangkatan Pegawai	1	Nota usul pengangkatan calon negeri sipil (CPNS)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-SDM-003-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	SK Pengangkatan CPNS		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							3	Penempatan calon pegawai		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							4	Penelitian khusus/litsus/screening		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							5	Perintah pemeriksaan kesehatan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							6	Perpanjangan Kontrak Tenaga Kependidikan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							7	Perpanjangan Kontrak Tenaga Pendidik		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
		~~01~~	~~MUTASI~~			"SDM.01 – Mutasi" tidak digunakan lihat penjelasan "SDM – Sumber Daya Manusia"											
			~~00~~	~~KEPANGKATAN~~													
			~~01~~	~~JABATAN~~													
			~~02~~	~~PEMINDAHAN~~													

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
			~~03~~	~~PEMINDAHAN SEMENTARA~~													
		02	PEMBINAAN KARIR PEGAWAI														
			00	PENINJAUAN MASA KERJA		Naskah-naskah yang berkaitan tentang peninjauan masa kerja pegawai	1	Usulan promosi atau demosi		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-SDM-011-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Usulan mutasi Pegawai		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							3	Surat keputusan mutasi		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							4	Usulan kenaikan pangkat		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			01	DISIPLIN PEGAWAI		Naskah-naskah yang berkaitan tentang disiplin pegawai	1	Tata tertib pegawai,	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							2	Daftar hadir/absensi dan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							3	Catatan pelanggaran.		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			02	PENILAIAN/ PENETAPAN ANGKA KREDIT		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Angka Kredit				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			03	SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)		Naskah-naskah yang berkaitan tentang SKP				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			04	TUGAS BELAJAR/ MAGANG/ DIKLAT/ KURSUS		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Tugas Belajar/ Diklat	1	Berkas usulan/permohonan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-KUI-013-UN2.R-OTL.03.00-2015

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
				~~00~~	~~TUGAS BELAJAR PROGRAM DIPLOMA~~	"SDM.02.04.00 hingga SDM.02.04.11" tidak digunakan lihat penjelasan "SDM.02.04 – Tugas Belajar/ Magang/ Diklat/ Kursus"	2	Surat tugas		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-SDM-009-UN2.R-OTL.03.00-2015
				~~01~~	~~TUGAS BELAJAR PROGRAM STRATA~~		3	Surat Keputusan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-SDM-007-UN2.R-OTL.03.00-2015
				~~02~~	~~DIKLAT PERSIAPAN KERJA (DPK)~~		4	Berkas pertanggung jawaban dan laporan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-SDM-008-UN2.R-OTL.03.00-2015
				~~03~~	~~DIKLAT PENYESUAIAN TUGAS (DPT)~~		5	Berkas permohonan (surat permohonan, surat rekomendasi, proposal, dll)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
				~~04~~	~~DIKLAT KENAIKAN GOLONGAN (DKG)~~		6	Surat persetujuan/penolakan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
				~~05~~	~~DIKLAT PENYESUAIAN IJAZAH (DPI)~~		7	Surat tugas belajar		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
				~~06~~	~~DIKLAT MANAJEMEN~~		8	Surat Perjanjian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
				~~07~~	~~DIKLAT KOMPUTER~~		9	Berkas perkembangan tugas belajar		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
				~~08~~	~~KURSUS/ PELATIHAN~~		10	Berkas Hasil akhir (Ijazah, sertifikat, Transkrip)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
				~~09~~	~~STUDI BANDING~~												
				~~10~~	~~SEMINAR/ KONFERENSI/ LOKAKARYA/ SIMPOSIUM~~												
				~~11~~	~~PENATARAN~~												

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
			05	UJIAN KOMPETENSI/ UJIAN DINAS PEGAWAI		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Ujian kompetensi/ Ujian Dinas Pegawai				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			~~06~~	~~KESEMPATAN PENDIDIKAN/ SEKOLAH DI LUAR JAM KERJA~~													
			07	DAFTAR URUT KEPANGKATAN		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Daftar urut kepangkatan			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			08	SANKSI DAN REHABILITASI		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Sanksi dan Rehabilitasi	1	Catatan pelanggaran pegawai		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							2	Surat Peringatan (SP)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							3	Keputusan sanksi dan rehabilitasi (penundaan gaji berkala, penurunan gaji, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, penurunan jabatan dan pencabutan jabatan).		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			~~09~~	~~REHABILITASI~~													
			10	PENGHARGAAN PEGAWAI DAN TANDA JASA		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Penghargaan Pegawai dan Tanda Jasa			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DPA-006-UN2.R-OTL.03.00-2015
			11	SENGKETA PEGAWAI		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Sengketa Pegawai	1	Pengumpulan informasi sengketa		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							2	Tindak lanjut sengketa pegawai		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							3	Hasil investigasi sengketa		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							4	Laporan sengketa pegawai		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
		03	KESEJAHTERAAN PEGAWAI														
			00	CUTI DAN IZIN PEGAWAI		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Cuti dan Izin Pegawai				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
				~~01~~	~~IZIN PEGAWAI~~												
			01	TABUNGAN PEGAWAI (PERUMAHAN, PENSIUN, DPLK)		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Tabungan Pegawai (Perumahan, Pensiun, dsb)	1	Pengajuan pembuatan atau formulir tabungan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							2	Kelengkapan berkas pengajuan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			02	KESEHATAN DAN ASURANSI		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Kesehatan dan Asuransi Pegawai	1	Formulir pengajuan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-SDM-001-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Berkas kelengkapan pegawai		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-SDM-015-UN2.R-OTL.03.00-2015
			~~03~~	~~KESEHATAN PEGAWAI~~		Indeks "SDM.03.03 – Kesehatan Pegawai" tidak digunakan Lihat "SDM.03.02 – KESEHATAN DAN ASURANSI"												POB-SDM-014-UN2.R-OTL.03.00-2015
			04	BANTUAN SOSIAL		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Bantuan sosial kepada pegawai	1	Tunjangan pernikahan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-SDM-016-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Bantuan biaya melahirkan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-SDM-018-UN2.R-OTL.03.00-2015
							3	Bantuan biaya pemakaman		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-SDM-019-UN2.R-OTL.03.00-2015
							4	Layanan Pakaian dinas pegawai		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-SDM-020-UN2.R-OTL.03.00-2015

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
			05	CAPACITY BUILDING		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Capacity Building/ Internal Corporate Value	1	Surat pengajuan kegiatan (Term of Reference - TOR)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							2	Pelaksanaan kegiatan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							3	Laporan kegiatan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		04	PENGHASILAN PEGAWAI														
			00	GAJI		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Gaji pegawai		Daftar Gaji/ Tunjangan/ Lembur/ Honorarium Prosedur penghasilan pegawai (Gaji/ Tunjangan/ Lembur/ Honor)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			~~01~~	~~TUNJANGAN~~													
			~~02~~	~~LEMBUR~~													
			03	GAJI BERKALA		Naskah-naskah yang berkaitan tentang berkas kenaikan gaji berkala		Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			04	PENYESUAIAN TUNJANGAN KELUARGA		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Penyesuaian tunjangan keluarga		Berkas KP4		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-SDM-004-UN2.R-OTL.03.00-2015
		05	ADMINISTRASI PEGAWAI														
			~~00~~	~~PERJALANAN DINAS~~													
			01	IDENTITAS PEGAWAI (KARPEG)		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Identitas Pegawai				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			~~02~~	~~IDENTITAS PEGAWAI~~													
			~~03~~	~~KEANGGOTAAN ORGANISASI~~													
			~~04~~	~~KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK~~													
			~~05~~	~~LAPORAN PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN~~													
			06	SURAT TUGAS		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Surat tugas kepada pegawai Surat Tugas menduduki jabatan masuk ke "HKP – Hukum dan Pengawasan"	1	Surat Penugasan Perjalanan Dinas		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-KUI-010-UN2.R-OTL.03.00-2015

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							2	Kelengkapan perjalanan dinas		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-KUI-009-UN2.R-OTL.03.00-2015
							3	Pembuatan ijin atau visa perjalanan luar negeri		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-KUI-008-UN2.R-OTL.03.00-2015
							4	Surat permohonan nara sumber		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-KUI-007-UN2.R-OTL.03.00-2015
							5	Surat tugas		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							6	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Tugas		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
		06	PEMBERHENTIAN PEGAWAI														
			00	ATAS PERMINTAAN SENDIRI		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Pemberhentian Pegawai atas permintaan sendiri	1	Surat pengajuan pengunduran diri		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		POB-SDM-006-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Persetujuan oleh pimpinan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			01	TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Pemberhentian Pegawai tidak atas permintaan sendiri	1	Pengajuan pemberhentian pegawai oleh pimpinan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							2	Penilaian kinerja pegawai		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							3	Persetetujuan atau penolakan pemberhentian		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							4	Keputusan pemberhentian pegawai		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			02	PENSIUN		Naskah-naskah yang berkaitan tentang pensiun pegawai	1	Pengajuan pensiun		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							2	Keputusan pensiun pegawai (SK)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			03	MENINGGAL DUNIA		Naskah-naskah yang berkaitan tentang pegawai meninggal dunia				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
		07	BERKAS PERORANGAN PEGAWAI			Naskah-naskah yang berkaitan tentang berkas perorangan pegawai		**Berkas ASN PNS, ASN P3K, PUI, PKWT, Kontrak Borongan**		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							1	Berkas lamaran yang diterima									
							2	Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya									
							3	Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN									
							4	SK Pengangkatan CPNS									
							5	Hasil Pengujian Kesehatan									
							6	SK Pengangkatan PNS									
							7	SK Peninjauan Masa Kerja									
							8	SK Kenaikkan Pangkat									
							9	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan									
							10	Surat Pernyataan Pelantikan									
							11	SK Pengangkatan dalam jabatan atau Pemberhentian dari									
							12	Jabatan Struktural/Fungsional									
							13	SK Perpindahan Wilayah Kerja									
							14	SK Perpindahan Antar Instansi									
							15	SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)									
							16	Berita Acara Pemeriksaan									
							17	SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS									
							18	SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk									
							19	SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan									
							20	SK Pemberian Uang Tunggu									
							21	SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai									
							22	Pejabat Negara									
							23	SK Pengalihan PNS									
							24	SK Pemberhentian sebagai PNS									
							25	SK Pemberhentian Sementara									
							26	Surat Keterangan Pernyataan Hilang									

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							27	Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang									
							28	SK Penggantian Nama									
							29	Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran									
							30	Surat Nikah/Cerai									
							31	Akta Kelahiran									
							32	Isian Formulir PUPNS									
							33	Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan									
							34	Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol									
							35	Surat Keterangan Mutasi Keluarga									
							36	Surat Keterangan Meninggal Dunia									
							37	Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan									
							38	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional									
							39	Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus									
							40	Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala									
							41	Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri									
							42	Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri									
							43	Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS									
							44	Ijazah/Sertifikat									
							45	SK Penempatan/Penarikan Pegawai									
							46	SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk									
							47	Surat Pertimbangan Status PNS									
							48	SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS									
							49	Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena									
							50	dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah									
							51	SK Pensiun									
4	HKP	HUKUM DAN PENGAWASAN															
		~~00~~	~~UNDANG-UNDANG~~														
		01	PERATURAN														
			~~00~~	~~PERATURAN DAN KEPUTUSAN PEMERINTAH~~													
			~~01~~	~~PERATURAN DAN KEPUTUSAN MENTERI~~													
			02	PERATURAN UNIVERSITAS		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Peraturan yang diterbitkan oleh Universitas	1	Peraturan Majelis Wali Amanat	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							2	Peraturan Dewan Guru Besar Universitas	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							3	Peraturan Senat Akademik Universitas	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							4	Peraturan Rektor	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-BLLH-003/UN2.R/OTL.03.00/2015
			03	PERATURAN FAKULTAS/ PROGRAM		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Peraturan yang diterbitkan oleh Fakultas/ Program/ Sekolah	1	Peraturan Dewan Guru Besar Fakultas	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							2	Peraturan Senat Akademik Fakultas	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							3	Peraturan Dekan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							4	Peraturan Direktur Sekolah	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							5	Peraturan Ketua Program Pendidikan Vokasi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		02	KEPUTUSAN														
			~~00~~	~~KEPUTUSAN PRESIDEN~~													
			~~01~~	~~KEPUTUSAN MENTERI~~													
			~~02~~	~~KEPUTUSAN GUBERNUR~~													
			03	KEPUTUSAN UNIVERSITAS					√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
				00	MAJELIS WALI AMANAT	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Keputusan yang diterbitkan oleh MWA			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
				01	SENAT AKADEMIK	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Keputusan yang diterbitkan oleh SA			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
				02	DEWAN GURU BESAR	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Keputusan yang diterbitkan oleh DGB			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
			04	KEPUTUSAN REKTOR/ DEKAN/ KETUA PROGRAM/ DAN DIREKTUR SEKOLAH					√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-BLLH-003/UN2.R/OTL.03.00/2015
				00	PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Keputusan Pengangkatan dan pemberhentian pegawai				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
				01	SKRIPSI/ TESIS/ DISERTASI	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Keputusan terkait skripsi, tesis, dan disertasi				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
				02	KEPANITIAAN	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Keputusan Kepanitiaan sebuah kegiatan				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
				03	KESEJAHTERAN PEGAWAI	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Keputusan Kesejahteraan Pegawai				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
				04	KEMAHASISWAAN	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Keputusan status mahasiswa				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
				05	PENDIDIKAN	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Keputusan akademik/ bidang pendidikan di lingkungan UI				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
				06	KEPEGAWAIAN	Naskah-naskah yang berkaitan tentang Keputusan Kepegawaian di lingkungan UI				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
		~~03~~	~~INSTRUKSI~~														
			~~00~~	~~INSTRUKSI PRESIDEN~~													
			~~01~~	~~INSTRUKSI MENTERI~~													
			~~02~~	~~INSTRUKSI GUBERNUR~~													
			~~03~~	~~INSTRUKSI UNIVERSITAS~~													
		04	SURAT EDARAN														
			~~00~~	~~SURAT EDARAN PRESIDEN~~													
			~~01~~	~~SURAT EDARAN MENTERI~~													
			~~02~~	~~SURAT EDARAN GUBERNUR~~													

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
			03	SURAT EDARAN UNIVERSITAS		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Surat Edaran di lingkungan Universitas Indonesia			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			~~04~~	~~SURAT EDARAN FAKULTAS~~													
		05	KERJASAMA														POB-DKS-001-UN2.R-OTL.03.00-2015
			~~00~~	~~PERJANJIAN/ KONTRAK/ SEWA~~													POB-DKS-003-UN2.R-OTL.03.00-2015
			01	AKADEMIK		Naskah-naskah yang berkaitan tentang kegiatan kerjasama dibidang Akademik	1	Perjanjian sewa/ kontrak/ beli,	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DITMAWA-001-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	kerjasama surat perintah kerja (SPK),	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-BLLH-002/UN2.R/OTL.03.00/2015
							3	Nota Kesepakatan Bersama (MoU / NKB).	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DKS-005-UN2.R-OTL.03.00-2015
							4	Pelaksanaan kerja sama (PKS)	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			02	NON-AKADEMIK		Naskah-naskah yang berkaitan tentang kegiatan kerjasama dibidang Non-Akademik	1	Perjanjian sewa/ kontrak/ beli,	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DKS-004-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	kerjasama surat perintah kerja (SPK),	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							3	Nota Kesepakatan Bersama (MoU / NKB).	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							4	Pelaksanaan kerja sama (PKS)	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		06	PENGAWASAN UNIVERSITAS														

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
			00	PENGAWASAN INTERNAL		Naskah-naskah yang berkaitan tentang kegiatan Pengawasan Internal di lingkungan UI, seperti Audit Internal.	1	Audit Keuangan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-BP3U-011/UN2.R/OTL.03.00/2015
							2	Audit Informasi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-BP3U-012/UN2.R/OTL.03.00/2015
							3	Pengawasan Kinerja	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-SPI-001/UN2.R/OTL.03.00/2015
																	POB-SPI-002/UN2.R/OTL.03.00/2015
																	POB-SPI-003/UN2.R/OTL.03.00/2015
																	POB-SPI-006/UN2.R/OTL.03.00/2015
			01	PENGAWASAN EKSTERNAL		Naskah-naskah yang berkaitan tentang kegiatan pengawasan oleh instansi luar, Irjen, BPK, KAP, dsb.	1	Audit Keuangan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							2	Audit Informasi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							3	Pengawasan Kinerja	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		07	PENYELESAIAN DAN BANTUAN HUKUM														POB-BLLH-004/UN2.R/OTL.03.00/2015
			00	AKADEMIK		Naskah-naskah yang berkaitan tentang penyelesaian bantuan hukum dalam bidang Akademik				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			01	NON AKADEMIK		Naskah-naskah yang berkaitan tentang penyelesaian bantuan hukum dalam bidang Non-Akademik				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
			02	KASUS PIDANA		Naskah-naskah yang berkaitan tentang penyelesaian bantuan hukum dalam kasus Pidana.				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			03	KASUS PERDATA		Naskah-naskah yang berkaitan tentang penyelesaian bantuan hukum dalam kasus Perdata.				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
		08	DOKUMENTASI HUKUM			Naskah-naskah yang berkaitan tentang referensi hukum instansi luar UI, Pemerintah, Kementerian/ Lembaga, dsb.			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
5	OTL	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA															
		00	ORGANISASI			Naskah-naskah yang berkaitan dengan Organisasi Universitas, mulai dari organ hingga unit kerja, dari pimpinan hingga deskripsi kerja ditingkat pelaksana. *Termasuk disini berkas terkait dengan MWA - Majelis Wali Amanah (berkaitan dengan ide atau gagasan menyangkut kebijakan perguruan tinggi)* *SA - Senat Akademik (berkaitan dengan ide atau gagasan menyangkut kegiatan perguruan tinggi)* *DGB – Dewan Guru Besar (meliputi administrasi pengangkatan komisi guru besar sampai dengan pemberhentian keanggotaan)*											
			00	PEMBENTUKAN			1	*Usulan pendirian, struktur organisasi.*	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DPA-002-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	*Drafi berkas pendirian organisasi*	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DPA-010-UN2.R-OTL.03.00-2015
							3	*Akta/ surat keputusan pendirian/ perubahan/ penghapusan,*	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							4	*JABATAN ORGANISASI*	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							5	*Deskripsi kerja jabatan*	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							6	*Tugas Kerja*	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			01	PERUBAHAN					√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			02	PENGHAPUSAN					√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		01	PERENCANAAN														
			00	RENCANA INDUK PENGEMBANGAN		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana pengembangan Universitas	1	Rencana Strategis Universitas	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-BP3U-007/UN2.R/OTL.03.00/2015
							2	Rencana Pengembangan Jangka Menengah	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-BP3U-009/UN2.R/OTL.03.00/2015
							3	Rencana Pengembangan Jangka Panjang	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			01	INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Indikator kinerja			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-BP3U-016/UN2.R/OTL.03.00/2015
			02	PENETAPAN KONTRAK KINERJA		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kontrak kinerja			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
			03	PROGRAM KERJA		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Program/ RKT	1	Usulan program kerja unit/ lembaga	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-BP3U-001/UN2.R/OTL.03.00/2015
							2	Berkas program kerja tahunan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			04	LAPORAN UNIVERSITAS		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan universitas (tahunan)	1	Laporan Akuntabilitas Universitas	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-BP3U-010/UN2.R/OTL.03.00/2015
							2	Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-BP3U-013/UN2.R/OTL.03.00/2015
							3	Laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							4	Laporan periodik	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							5	Laporan Tahunan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		~~02~~	~~AKREDITASI~~														
		03	TATA LAKSANA														
			00	STANDARISASI (POB, SPM, INSTRUKSI KERJA)		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Standardisasi sistem dan prosedur yang berlaku di UI		**SISTEM AKUNTANSI**	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							2	Kebijakan Akuntansi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP			Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
										B	T	R	SR					
	1	2	3	4														
							3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							4	Laporan realisasi anggaran dan neraca bulanan		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							5	Laporan realisasi anggaran dan neraca tahunan		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							6	Laporan realisasi semesteran APBN		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
								Dokumentasi Sistem Informasi		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							1	source code,		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							2	user manual, admin Manual, dan		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							3	dokumentasi teknis pengembangan.		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
								Prosedur Penerimaan Mahasiswa		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							1	Persyaratan penerimaan mahasiswa		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							2	Jadwal pelaksanaan kegiatan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							3	Formulir Pendaftaran (borang template)	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			~~01~~	~~PROGRAM KERJA~~													
			~~02~~	~~STANDARDISASI~~													
			03	TATA RUANG/ LAYOUT		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tata Letak dan layout ruang kerja		Alur evakuasi gedung	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			04	NOTULEN RAPAT		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rapat terutama adalah Notulensi Rapat.			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		04	KEPROTOKOLAN														
			00	UPACARA/ ACARA		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan upacara/ acara	1	Upacara hari besar nasional,	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-HUMAS-005-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	HUT fakultas/ universitas,	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							3	Acara pimpinan,	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							4	Pelantikan,	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							5	Serah terima jabatan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			01	KUNJUNGAN		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan kunjungan			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-KUI-005-UN2.R-OTL.03.00-2015
		~~05~~	~~TATA PERSURATAN~~														

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
		~~06~~	~~PENGURUSAN SURAT~~														
			~~00~~	~~BUKU AGENDA~~													
			~~01~~	~~LEMBAR SURAT PENGANTAR~~													
			~~02~~	~~FORMULIR~~													
		~~07~~	~~PENGGANDAAN~~														
		08	MANAJEMEN DOKUMEN DAN ARSIP														
			00	PEMINDAHAN REKOD KE PUSAT REKOD		Naskah-naskah yang berkaitan tentang pemindahan rekod			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-ARSIP-003-UN2.R-OTL.03.00-2015
			01	PEMINJAMAN REKOD		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peminjaman Rekod	1	Surat permohonan informasi arsip	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-ARSIP-010-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Borang/ Formulir peminjaman arsip	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							3	Berkas persetujuan atau penolakan permohonan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			02	PENYUSUTAN/ PEMUSNAHAN		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusutan/ Pemusnahan	1	Surat permohonan penyusutan,	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-ARSIP-004-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Daftar arsip	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							3	Berita acara,	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							4	Laporan kegiatan penyusutan.	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			03	PEMBINAAN		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pembinaan kearsipan			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
			04	ADMINISTRASI NASKAH DINAS		Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses administrasi naskah dinas di lingkungan UI	1	Agenda dan ekspedisi surat	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-ARSIP-001-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Penggandaan surat	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-ARSIP-002-UN2.R-OTL.03.00-2015
		09	MANAJEMEN RISIKO DAN KESELAMATAN KERJA			Naskah-naskah yang berkaitan dengan Manajemen Risiko dan Keselamatan Kerja	1	Profil risiko unit	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-K3L-001-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Mitigasi risiko unit	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-K3L-004-UN2.R-OTL.03.00-2015
							3	Data risiko universitas	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
6	**HMI**	**HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMATIKA**															
		00	HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA			Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Hubungan Antar Lembaga			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-HUMAS-003-UN2.R-OTL.03.00-2015
		01	PEMBERITAAN			Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemberitaan UI oleh media massa			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-HUMAS-002-UN2.R-OTL.03.00-2015
			~~00~~	~~RADIO~~													
			~~01~~	~~PERS~~													
			~~02~~	~~TELEVISI~~													
			~~03~~	~~INTERNET~~													
		02	PAMERAN			Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pameran UI, Open House, dsb.			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-HUMAS-004-UN2.R-OTL.03.00-2015
			~~00~~	~~PEMBANGUNAN~~													
			~~01~~	~~PENDIDIKAN~~													
			~~02~~	~~MITRA KERJA/ PARTISIPASI~~													
		03	PUBLIKASI/ PENERBITAN			Naskah-naskah yang berkaitan dengan Publikasi/ penerbitan UI.	1	majalah, buletin, jurnal	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-HUMAS-001-UN2.R-OTL.03.00-2015

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP			Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
										B	T	R	SR					
	1	2	3	4														
			~~00~~	~~MAJALAH~~			2	booklet/leaflet,	√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			~~01~~	~~BROSUR~~			3	iklan layanan masyarakat dan universitas	√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			~~02~~	~~SPONSOR~~			4	buku pedoman akademik	√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							5	Pidato Akademik	√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							6	Orasi Ilmiah	√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							7	Sambutan tokoh penting	√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							8	Profil lembaga	√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							9	Buku wisuda	√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							10	Buku Dies Natalis	√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		04	INFORMATIKA															
			00	DATA/ STATISTIK AKADEMIK & NON-AKADEMIK UNIVERSITAS		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Data dan Statistik UI	1	statistik penelitian dan pengabdian masyarakat	√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP			Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
										B	T	R	SR					
	1	2	3	4														
							2	statistik guru besar pada setiap fakultas		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							3	statistik penerimaan mahasiswa		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							4	statistik kinerja pegawai, dsb		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							5	Statistik permintaan informasi publik		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							6	Data kepakaran		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							7	Data lulusan mahasiswa/ data lulusan mahasiswa terbaik		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							8	Data mahasiswa program beasiswa		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							9	Data alumni			√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			01	PENGUMPULANN DAN PENGOLAHAN		Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengolahan data universitas	1	Surat Permohonan,		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							2	Pengolahan data, dan		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							3	Laporan atau hasil pengolahan data dan informasi.		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP			Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
										B	T	R	SR					
	1	2	3	4														
							4	Data kepakaran		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							5	Data lulusan mahasiswa			√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
							6	Data mahasiswa asing dan dharma siswa		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							7	Data dosen asing		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							8	Data prestasi mahasiswa		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							9	Data inventori mahasiswa		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							10	Data nilai akhir/transkrip			√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya privacy seseorang		
			02	PENYAJIAN INFORMASI PUBLIK		Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyajian informasi publik	1	Prosedur dan Kebijakan Permintaan Informasi Publik UI		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							2	Formulir permintaan informasi		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							3	Daftar permintaan informasi		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							4	Laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat		√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
		05	DOKUMENTASI			Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumentasi kegiatan/ partisipasi UI dalam tingkat Nasional maupun Internasional dalam bentuk Kliping, Foto, dan Video.											
			00	KLIPING					√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			01	FOTO					√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			02	AUDIO VISUAL					√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
7	KEU	KEUANGAN															
		00	RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA														
			01	RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Pendapatan Negara, seperti pendapatan negara bukan pajak (PNBP)	1	Pagu indikatif/pagu anggaran	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							2	Pagu defenitif	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							3	Penyusunan RAPBN	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							4	Kebijakan Umum, Renstra, Strategis dan Prioritas	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							5	Dokumen rencana strategis untuk rencana jangka panjang	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP			Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
										B	T	R	SR					
	1	2	3	4														
							6	Rencana Kerja Anggaran Tahunan	√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							7	Dokumen usulan dan penetapan target penerimaan Negara	√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							8	Dokumen penetapan RAPBN dan RAPBN-P	√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			02	RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNIVERSITAS		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Pendapatan Unversitas, seperti Dana Damas, dsb.	1	Dokumen prioritas plafon anggaran	√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-BP3U-002/UN2.R/OTL.03.00/2015
							2	Daftar usulan proyek / kegiatan	√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-BP3U-003/UN2.R/OTL.03.00/2015
							3	Daftar usulan program masing-masing unit kerja	√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							4	Dokumen Rencana Kerja Anggaran Universitas	√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							5	Dokumen penetapan RAPB Universitas Indonesia	√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		01	REALISASI PENERIMAAN ANGGARAN															
			00	PENDAFTARAN MAHASISWA/ REGISTRASI		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penerimaan dari kegiatan pendaftaran mahasiswa baru			√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			01	UANG KULIAH		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penerimaan universitas yang berasal dari uang kuliah mahasiswa			√					Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DITKEU-002-UN2.R-OTL.03.00-2015

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
			02	UANG WISUDA		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penerimaan universitas yang berasal dari uang wisuda mahasiswa			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			03	SUMBER LAIN		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penerimaan Universitas yang berasal dari sumber lain.	1	Realisasi penerimaan dana pendidikan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DITKEU-003-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Penerimaan laba investasi bank	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DITKEU-004-UN2.R-OTL.03.00-2015
							3	Laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			04	BANTUAN PEMERINTAH		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penerimaan Universitas yang berasal dari Bantuan Pemerintah	1	BOPTN	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DITKEU-001-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Surat pengajuan alokasi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							3	Ketentuan pengelolaan dana bantuan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							4	Kerangka Acuan Kerja / Rencana Anggaran Biaya	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							5	Laporan penerimaan dana	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							6	Laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		02	REALISASI BELANJA ANGGARAN			Naskah-naskah yang berkaitan dengan Realisasi pengeluaran belanja, termasuk penggunaan dana dari BP dan non-BP											POB-BP3U-006/UN2.R/OTL.03.00/2015

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
			00	BELANJA PEGAWAI		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Belanja Pegawai Universitas			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DITKEU-005-UN2.R-OTL.03.00-2015
			01	BELANJA PERJALANAN		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Belanja Perjalananan Universitas			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DITKEU-006-UN2.R-OTL.03.00-2015
				00	OPERASIONAL BIDANG AKADEMIK	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Realisasi belanja dibidang Akademik			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
				01	OPERASIONAL BIDANG PENELITIAN	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Realisasi belanja dibidang Penelitian			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
				02	OPERASIONAL BIDANG PENGABDIAN	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Realisasi belanja dibidang Pengabdian			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
				03	OPERASIONAL BIDANG KEMAHASISWAAN	Naskah-naskah yang berkaitan tentang pengelolaan keuangan bidang kemahasiswaan, seperti dana beasiswa, permohonan bantuan dana, Biaya Pendidikan, dan kegiatan mahasiswa lainnya.		Laporan dan rekapitulasi pengelolaan dana beasiswa (pendonor/ mitra UI, Kemenristekdikti, dsb)	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			02	BELANJA BARANG DAN JASA		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Realisasi belanja barang dan jasa			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			03	BELANJA PEMELIHARAAN		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Realisasi belanja pemeliharaan/ perawatan barang/ jasa.			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			~~04~~	~~PENGELUARAN PEMBANGUNAN~~		Indeks "KEU.02.04 – Pengeluaran Pembangunan", "KEU.02.04.00 – Pemeliharaan Sarana", dan "KEU.02.04.01 – Pajak" tidak digunakan Lihat "KEU.02.05 – PAJAK"											
				~~00~~	~~PEMELIHARAAN SARANA~~											
				~~01~~	~~PAJAK~~											
			05	PAJAK		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penghitungan Pajak		Surat Setoran Pajak	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
		03	PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN			Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas, laporan bulanan, trimester, semester, tahunan.											
			01	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN EKSTERNAL		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Eksternal			√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			02	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Internal	1	Laporan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							2	Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP)	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			03	DOKUMEN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA		Naskah-naskah yang berkaitan tentang penyelesaian kerugian negara.	1	Tuntutan Perbendaharaan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							2	Tuntutan Ganti Rugi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
8	**LOG**	**LOGISTIK**															
		00	PERENCANAAN PENGADAAN BARANG														POB-DITLOG-001-UN2.R-OTL.03.00-2015
			01	REGISTRASI DAN VERIFIKASI		Naskah-naskah yang berkaitan tentang kegiatan Registrasi dan verifikasi Perencanaan pengadaan barang dan jasa	1	Laporan registrasi dan verifikasi	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-DITLOG-005-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Laporan verifkasi lapangan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							3	Laporan penindaklanjutan verifikasi lapangan	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							4	Laporan penon-aktifan penyedia	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							5	Data penyedia									
			02	RENCANA UMUM PENGADAAN		Naskah-naskah yang berkaitan tentang penyusunan dan pembahasan rencana umum pengadaan (RUP)	1	Laporan mingguan RUP	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		POB-BP3U-005/UN2.R/OTL.03.00/2015
							2	Laporan semesteran RUP	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							3	Laporan Tahunan RUP	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							4	Laporan monitorin RUP	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
							5	Klarifikasi RUP	√				Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal; 4. Publik; 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		01	PENGADAAN														POB-DITLOG-018-UN2.R-OTL.03.00-2015
			00	BARANG BERGERAK		Naskah-naskah yang berkaitan tentang berkas teknis pengadaan barang bergerak.	1	*Surat permohonan*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		POB-ULP-001-UN2.R-OTL.03.00-2015
				~~00~~	~~PERABOT KANTOR~~		2	Term of Reference (ToR)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
				~~01~~	~~KOMPUTER~~		3	Dokumen persyaratan administrasi (elektronik dan tercetak)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
				~~02~~	~~KENDARAAN~~		4	Permohonan penyediaan pengadaan barang bergerak		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
				~~03~~	~~MESIN KANTOR~~		5	Penunjukan tanpa Surat Perintah Kerja (SPK)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
				~~04~~	~~ALAT TULIS KANTOR~~		6	Penunjukan dengan Surat Perintah Kerja (SPK)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
				~~05~~	~~PERALATAN LAINNYA~~		7	Berkas pengadaan Penunjukan langsung		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
				~~06~~	~~CETAKAN~~		8	Berkas Lelang		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
			01	BARANG TIDAK BERGERAK		Naskah-naskah yang berkaitan tentang pengadaan barang tidak bergerak.				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
				00	TANAH					√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
				01	BANGUNAN	Naskah-naskah yang berkaitan tentang pengadaan bangunan, rencana konstruksi, hingga As Built Drawing.	1	*Surat permohonan*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							2	Term of Reference (ToR)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							3	Korespondensi pengadaan barang tidak bergerak		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							4	Dokumen persyaratan administrasi (elektronik dan tercetak)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							5	Penunjukan tanpa Surat Perintah Kerja (SPK)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							6	Penunjukan dengan Surat Perintah Kerja (SPK)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
			02	DISTRIBUSI													POB-DITLOG-014-UN2.R-OTL.03.00-2015
				00	BARANG BERGERAK	Naskah-naskah yang berkaitan tentang proses distribusi barang bergerak		Surat permintaan dari Unit Kerja		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
				01	CETAKAN	Naskah-naskah yang berkaitan tentang proses distribusi barang tercetak	1	Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							2	Surat Perintah Mengeluarkan Barang Inventarisasi (SPMBI)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							3	Berita Acara Serah Terima Distribusi Barang		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
			03	JASA		Naskah-naskah yang berkaitan tentang pengadaan jasa di lingkungan UI	1	Pengumuman		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							2	Permohonan penawaran		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							3	Seleksi		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							4	Dokumen kontrak		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							5	Laporan kemajuan pekerjaan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							6	Berita acara penyelesaian pekerjaan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							7	Faktur pajak		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
		03	INVENTARISASI														POB-DPPF-006-UN2.R-OTL.03.00-2015
			00	BARANG BERGERAK		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Inventarisasi barang bergerak	1	*Daftar Opname Fisik Aset*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		POB-DPPF-007-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	*Kartu inventaris barang*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		POB-DPPF-008-UN2.R-OTL.03.00-2015
							3	*Buku inventaris/pembantu inventaris*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							4	*Laporan tahunan inventaris*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
			01	BARANG TIDAK BERGERAK		Naskah-naskah yang berkaitan tentang Inventarisasi barang tidak bergerak	1	*Daftar Inventaris Ruangan (DIR)*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							2	*Buku inventaris/pembantu inventaris*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							3	*Laporan tahunan inventaris*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
		04	PENGHAPUSAN DAN PENYUSUTAN ASET			Naskah-naskah yang berkaitan tentang proses penghapusan dan penyusutan aset universitas	1	Surat permohonan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		POB-DPPF-009-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Rekap/daftar barang		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							3	Surat persetujuan/penolakan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							4	Berkas lelang penghapusan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							5	Berita acara hasil lelang		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							6	Surat keputusan pimpinan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							7	Laporan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
		03	BUKTI KEPEMILIKAN ASET			Naskah-naskah yang berkaitan tentang Bukti Kepemilikan Aset	1	Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		POB-BLLH-001/UN2.R/OTL.03.00/2015
							2	Bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							3	Sertifikat Tanah/Bangunan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							4	Akta Jual Beli		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							5	Surat Izin Mendirikan Bangunan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							6	Master Plan (gambar teknik)		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
9	RTK	RUMAH TANGGA KANTOR															
		00	PENGGUNAAN SARANA KANTOR			Naskah-naskah yang berkaitan tentang Penggunaan Sarana Kantor	1	Penggunaan Ruangan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		POB-DPPF-001-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Rekap penggunaan Peralatan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							3	Perlengkapan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							4	Formulir penggunaan fasilitas kendaraan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							5	Ruangan rapat		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
		01	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR														POB-DPPF-004-UN2.R-OTL.03.00-2015
			00	TANAH		Naskah-naskah yang berkaitan tentang pemeliharaan aset tanah				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
			01	BANGUNAN		Naskah-naskah yang berkaitan tentang pemeliharaan aset bangunan				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
			02	PERALATAN KANTOR		Naskah-naskah yang berkaitan tentang pemeliharaan peralatan kantor	1	*meja dan kursi*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							2	*alat rumah tangga*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							3	*alat pertamanan*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							4	*alat teknisi/ perkakas*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
			03	KENDARAAN DINAS		Naskah-naskah yang berkaitan tentang pemeliharaan kendaraan dinas				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
			04	MESIN KANTOR		Naskah-naskah yang berkaitan tentang pemeliharaan mesin kantor				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
			~~05~~	~~PERALATAN LAINNYA~~													
			06	KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN		Naskah-naskah yang berkaitan tentang pemeliharaan kebersihan dan pertamanan di lingkungan UI	1	*cleaning services*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							2	*pertamanan dan kebun*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							3	*pohon dan hutan kota*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
			~~07~~	~~KEAMANAN DAN KETERTIBAN~~													
			08	PELAYANAN FASILITAS KANTOR		Naskah-naskah yang berkaitan tentang pelayanan fasilitas kantor				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
		02	PENGELOLAAN KANTIN			Naskah-naskah yang berkaitan tentang pengelolaan kantin				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
		03	PENGELOLAAN KOPERASI			Naskah-naskah yang berkaitan tentang pengelolaan koperasi	1	*susunan kepengurusan*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							2	*kegiatan operasional*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN		JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							3	*laporan pertanggungjawaban dan pembagian sisa hasil usaha (SHU)*		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
		04	PENGELOLAAN MASJID/MUSHOLA			Naskah-naskah yang berkaitan tentang pengelolaan masjid/ mushola				√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
		05	TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI														
			00	INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN		Naskah-naskah yang berkaitan tentang pemeliharaan infrastruktur dan jaringan UI	1	Surat permohonan,		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		POB-DSTI-013-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Pelaksanaan instalasi jaringan,		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
								Laporan dan cetak biru jaringan unit kerja di lingkungan UI		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
			01	IT SUPPORT		Naskah-naskah yang berkaitan tentang IT Support/ Helpdesk DSTI UI	1	Layanan sistem informasi di lingkungan UI		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		POB-DSTI-016-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	Berkas sosialisasi dan pelatihan sistem informasi.		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
		06	KEAMANAN DAN KETERTIBAN KAMPUS			Naskah-naskah yang berkaitan tentang Keamanan dan Ketertibang Lingkungan Kampus	1	keamanan dan ruang parkir		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		POB-PLK-001-UN2.R-OTL.03.00-2015
							2	bantuan keamanan		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							3	bencana alam		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		

NO	KLASIFIKASI					PENJELASAN	JENIS ARSIP		Klasifikasi Keamanan (Terbuka, Terbatas, Rahasia, Sangat Rahasia)				Informasi Publik (Terbuka/ Dikecualikan)	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	No. POB
									B	T	R	SR					
	1	2	3	4													
							4	banjir		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		
							5	kebakaran		√			Dikecualikan	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal; 3.Penegak Hukum 4. Yang bersangkutan (tim dan peserta ujian)	Karena Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya peran dan fungsi universitas		

Nama POB
Prosedur Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Nama POB
Prosedur Pendaftaran Online Penerimaan Mahasiswa Baru
Prosedur Pelaksanaan Ujian Mahasiswa Baru

Nama POB
Prosedur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Undangan
Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Asing
Prosedur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Olimpiade Sains

Nama POB
Prosedur Registrasi Mahasiswa Baru

Nama POB

Nama POB
Prosedur Pertukaran Mahasiswa UI ke Universitas Mitra Melalui Program Asosiasi Forum Internasional
Prosedur Pertukaran Mahasiswa Asing ke UI
Prosedur Pengajuan Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan
Prosedur Perizinan Kegiatan Kemahasiswaan

Nama POB

Nama POB
Prosedur Kegiatan Pelatihan, Seminar, Kuliah Umum Inovasi, dan Kewirausahaan
Prosedur Pertukaran Mahasiswa UI ke Universitas Mitra Melalui Program Asosiasi Forum Internasional

Nama POB
Prosedur Pertukaran Mahasiswa Asing ke UI

Nama POB
Prosedur Pengelelolaan Beasiswa Mahasiswa Baru dan Lama (Non Bidikmisi dan Afirmasi)
Prosedur Pengelolaan Beasiswa Bidikmisi Tahap Penerimaan
Prosedur Pengeloaan Beasiswa Bidikmisi Tahap Pembinaan
Pengelolaan Beasiswa Afirmasi Tahap Penerimaan
Pengelolaan Beasiswa Afirmasi Tahap Pembinaan
Prosedur Seleksi Beasiswa Asosiasi

Nama POB
Prosedur Pengajuan Biaya Pendidikan BOP Berkeadilan (BOPB) Mahasiswa Baru Tahun Akademik
Prosedur Pengajuan Keringanan Atas Penetapan BOP Berkeadilan Mahasiswa Baru

Nama POB
Prosedur Layanan Pendampingan Mahasiswa Baru
Prosedur Layanan Konseling Mahasiswa
Prosedur Layanan Terapi Kelompok

Nama POB
Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan Mahasiswa
Prosedur Pendaftaran Pelayanan Kesehatan
Prosedur Tracer Study UI
Prosedur Penggalangan Dana Abadi UI

Nama POB
Prosedur Penyelenggaraan UI Career & Scholarship Expo
Prosedur Layanan Wisuda
Prosedur Penerbitan Ijazah

Nama POB
Prosedur Penyusunan Jadwal Perkuliahan

Nama POB
Prosedur Cuti Akademik
Prosedur Penerbitan SK Rektor Putus Studi

Nama POB
Prosedur Penerbitan SK Rektor tentang Pengunduran Diri
Prosedur Tunda Kuliah

Nama POB
Prosedur Pengelolaan Limbah Laboratorium
Prosedur Manajemen Infrastruktur Laboratorium
Prosedur Penerbitan Surat Bebas Pinjam Pustaka
Prosedur Penerimaan Karya Ilmiah UIANA

Nama POB

Nama POB

Nama POB
Prosedur Pemutakhiran SK Kurikulum

Nama POB

Nama POB
Prosedur Pengembangan Kurikulum

Nama POB

Nama POB
Prosedur EDOM dan EFOM
Prosedur EVISEM dan EVITAH Program Studi

Nama POB
Prosedur Evaluasi Pemenuhan SNP-PLUS di UI dan Implementasi SPMI di UI
Prosedur EVIN Program Studi Persiapan Akreditasi BAN PT/LAM PT
Prosedur EVIN Persiapan Asesmen AUN-QA
Prosedur Pelaksanaan Asesmen AUN-QA
Prosedur Monitoring dan Evaluasi MONEVIN Unit Kerja Terkait Mutu
Prosedur Monitoring dan Evaluasi E-Learning
Prosedur Kegiatan Audit Internal Akademik di Universitas Indonesia
Prosedur Sertifikasi Dosen

Nama POB
Prosedur Sosialisasi dan Pengajuan Hibah UI
Prosedur Sosialisasi dan Pengajuan Hibah Eksternal UI
Prosedur Monitoring dan Evaluasi Hibah UI
Prosedur Penanganan Laporan Kemajuan atau Akhir Hibah UI

Nama POB

Nama POB
Prosedur Kerja Sama Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
Prosedur Pencairan Dana Hibah Riset dan Pengmas UI
Prosedur Kegiatan Pelatihan,Seminar, Kuliah Umum Inovasi,dan Kewirausahaan

Nama POB
Prosedur Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) UI

Nama POB
Prosedur Kegiatan AsistensiMediasi Pemeriksaan Subtansi Paten UI
Prosedur Kegiatan Paten Drafting (Penulisan Deskripsi Paten) UI

Nama POB

Nama POB
Prosedur Penerimaan Tendik dan Dosen PNS
Prosedur Penerimaan Tendik dan Dosen PUI atau PKWT

Nama POB
Prosedur Rotasi dan Mutasi Pegawai
Prosedur Pengiriman Mahasiswa dan staf UI melalui Skema Beasiswa

Nama POB
Prosedur Pengaktifan jabatan Fungsional Setelah Tugas Belajar
Prosedur Pembebasan Sementara Jabatan Fungsional Tugas Belajar (PFTB)
Prosedur Usulan Pembuatan Surat Keputusan Izin Tugas Belajar (SKTB)

Nama POB
Prosedur Seleksi Dosen dan Kaprodi Berprestasi

Nama POB
Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi
Prosedur Pendaftaran Asuransi untuk Keluarga
Prosedur Pendaftaran BPJS untuk Keluarga
Prosedur Klaim BPJS Ketenagakerjaan
Prosedur Bantuan Pernikahan Pegawai Pusat Administrasi Universitas
Prosedur Santunan Duka Cita Pegawai atau Keluarga Pegawai Pusat Administrasi Universitas
Prosedur Pengajuan Bantuan Biaya Kelahiran Anak Pegawai Pusat Administrasi Universitas

Nama POB
Prosedur Pengajuan Tunjangan Keluarga
Prosedur Pengurusan Izin Belajar dan Permohonan Visa (Study Permit and Limited Stay Visa Application)

Nama POB
Prosedur Permohonan Visa untuk Staf Menggunakan Paspor Dinas (Paspor Biru) - Outbound
Prosedur Permohonan Visa untuk Staf Menggunakan Paspor Biasa (Paspor Hijau) - Outbound
Prosedur Pengurusan Staf dan Peneliti UI ke Luar Negeri (Dengan Disposisi)
Prosedur Usulan Pengunduran Diri Pegawai

Nama POB

Nama POB

Nama POB
Prosedur Pembuatan Surat Keputusan dan Peraturan Rektor UI

Nama POB
Prosedur Pembuatan Surat Keputusan dan Peraturan Rektor UI

Nama POB
Prosedur Pengusulan dan Pemrosesan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Dalam Negeri
Prosedur Pengusulan dan Pemrosesan Kesepakatan Bersama (MoU) Luar Negeri
Prosedur Kerjasama Beasiswa Universitas Indonesia
Prosedur Pelayanan atau Pengolahan dan Analisis Naskah Kontrak
Prosedur Pengusulan dan Pemrosesan Perjanjian Kerja Sama (AoI) Joint Degree-Dual Degree
Prosedur Pengusulan dan Pemrosesan Perjanjian Kerjasama (Aol) Luar Negeri

Nama POB
Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Organisasi
Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran
Prosedur Pelaksanaan Audit/Review Keuangan dan Non Keuangan Berdasarkan RKT SPI
Prosedur Pelaksanaan Audit/Review Keuangan dan Non Keuangan Berdasarkan Permintaan MWA
Prosedur Pelaksanaan Audit/Review Keuangan dan Non Keuangan Berdasarkan Permintaan Rektor
Prosedur Pelaksanaan Monev Hasil Audit Intenal dan Eksternal
Prosedur Penyelesaian Perkara Pengadilan, Quasi Pengadilan, dan P3T2

Nama POB
Prosedur Pembukaan Program Studi Baru
Prosedur Pembukaan Peminatan Baru

Nama POB
Prosedur Pengembangan Master Plan Universitas Indonesia
Prosedur Penyusunan Rencana Strategis Universitas Indonesia
Prosedur Penyusunan Kontrak Kinerja UI

Nama POB
Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Prosedur Penyusunan Laporan Tahunan Universitas Indonesia
Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Universitas Indonesia

Nama POB

Nama POB
Prosedur Penyelenggaraan Acara dan Protokol
Prosedur Penerimaan Kunjungan Tamu Internasional

Nama POB
Prosedur Pemindahan Arsip
Prosedur Layanan Arsip
Prosedur Pemusnahan Arsip

Nama POB
Prosedur Surat Masuk
Prosedur Surat Keluar Instansi Eksternal
Prosedur Analisis Bahaya dan Risiko K3L
Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat
Prosedur Penggunaan Logo
Prosedur Pengelolaan Media Informasi
Prosedur Promosi Program Studi dan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru
Prosedur Penerbitan Informasi

Nama POB

Nama POB

Nama POB

Nama POB

Nama POB
Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Penerimaan
Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pengeluaran
Prosedur Penerimaan Dana BP

Nama POB
Prosedur Penerimaan Dana Non BP (Melalui Direktorat Kerja Sama)
Prosedur Penerimaan Dana Non BP (Tidak Melalui Direktorat Kerja Sama)
Prosedur Penerimaan Dana BPPTN
Prosedur Pengajuan dan Pemrosesan Rencana Implementasi Bulanan (RIB)

Nama POB
Prosedur Penggunaan Dana BPPTN
Prosedur Pencairan Dana Non APBN

Nama POB
Prosedur Pengajuan Permohonan Pengadaan Barang dan Jasa
Prosedur Penyusunan dan Tandatangan HPS

Nama POB
Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
Prosedur Pembentukan Tim Teknis
Prosedur Pengajuan Permohonan Pengadaan Barang dan Jasa

Nama POB

Nama POB
Prosedur Penerimaan & Distribusi Barang Jasa

Nama POB
Prosedur Pencatatan Pengakuan Aset PTN BH UI (Perolehan Melalui Kas Operasional)
Prosedur Pencatatan Pengakuan Aset PTN BH UI (Perolehan Melalui Pengadaan)
Prosedur Pelaporan Aset PTN BH UI
Prosedur Penghapusan Barang Milik Universitas Indonesia

Nama POB
Prosedur Layanan Status Hukum dan/atau Analisa Legalitas Aset

Nama POB
Prosedur Penyediaan Barang Habis Pakai/ATK Rutin
Prosedur Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas

Nama POB

Nama POB
Prosedur Penanganan Layanan Teknis
Prosedur Permintaan Pencetakan Kartu Identitas Hilang/ Rusak
Prosedur Izin Keramaian

Nama POB